

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (013.03)
Untuk Periode yang Berakhir
30 September 2022

Jl. Kayoon No. 50 - 52
Surabaya

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur adalah salah satu entitas di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surabaya,
Kepala Kantor Wilayah,



Zaeroji
NIP. 196211011985031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
JALAN KAYOON NO 50 52 SURABAYA
TELEPON 031- 5340707, FAXIMILE 031 - 5345496

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya,
Kepala Kantor Wilayah,



Zaeroji
NIP. 196211011985031002

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur Triwulan III Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Triwulan III TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.16.617.798,- atau mencapai 00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.000,-

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.9.296.831.864,- atau mencapai 59 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.15.657.149.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Triwulan III TA 2022. Nilai Aset per 30 September 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp.135.199.418.520,- yang terdiri dari: Aset Lancar Rp. 650.249.322, Aset Tetap Rp. 134.549.169.198, Aset Lainnya Rp. 000,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 954.510.625,- dan Rp. 134.244.907.895,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2022 adalah sebesar Rp.18.054.032,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.9.279.112.844,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(9.261.058.812),-. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.000,- dan Rp.(000) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(9.261.058.812),-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp.134.230.991.391,- ditambah Defisit-LO sebesar Rp.(9.261.058.812),- kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas senilai Rp.9.274.975.316,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2022 adalah senilai Rp.134.244.907.895,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Triwulan III Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	16.617.798	0,00	23.722.467
JUMLAH PENDAPATAN		-	16.617.798		23.722.467
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	2.296.384.000	1.799.226.921	78,35	2.008.265.527
Belanja Barang	B.4	11.594.765.000	6.192.306.143	53,41	4.454.316.157
Belanja Modal	B.5	1.766.000.000	1.305.298.800	73,91	1.231.557.800
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		15.657.149.000	9.296.831.864	59,38	7.694.139.484

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR NERACA PER 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	362.112.000	
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	240.365.000	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	1.436.234	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajang			
Bagian Lancar TP/TGR	C.5		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7		
Belanja Dibayar di Muka	C.8		36.927.123
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9		
Persediaan	C.10	46.336.088	11.324.185
Jumlah Aset Lancar		650.249.322	48.251.308
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11		
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13		
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	114.941.838.000	114.941.838.000
Peralatan dan Mesin	C.15	9.000.832.428	7.771.201.345
Gedung dan Bangunan	C.16	19.191.884.964	19.191.884.964
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17		
Aset Tetap Lainnya	C.18		
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(8.585.386.194)	(7.721.813.026)
Jumlah Aset Tetap		134.549.169.198	134.183.111.283
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21		
Aset Lain-Lain	C.22	940.711.598	948.711.598
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(940.711.598)	(948.711.598)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		135.199.418.520	134.231.362.591
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	362.112.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	452.398.141	371.200
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	140.000.484	
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	-	-
Hibah yang belum disah kan	C.28		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		954.510.625	371.200
JUMLAH KEWAJIBAN		954.510.625	371.200
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	134.244.907.895	134.230.991.391
JUMLAH EKUITAS		134.244.907.895	134.230.991.391
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		135.199.418.520	134.231.362.591

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Sep-22	30-Sep-21
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	18.054.032	19.972.467
JUMLAH PENDAPATAN		18.054.032	19.972.467
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.936.080.062	2.008.265.527
Beban Persediaan	D.3	72.760.961	117.151.610
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.653.747.259	2.927.200.286
Beban Pemeliharaan	D.5	386.683.081	516.316.606
Beban Perjalanan	D.6	2.240.839.346	940.397.654
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	989.002.135	692.881.912
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		9.279.112.844	7.202.213.595
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(9.261.058.812)	(7.182.241.128)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11		3.750.000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Selisih Kurs			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(9.261.058.812)	(7.178.491.128)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBPN	D.12		
Beban Perjalanan Dinas			
Beban Persediaan			
SURPLUS/DEFISIT LO		(9.261.058.812)	(7.178.491.128)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2022 dan 2021***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	134.230.991.391	131.206.008.297
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(9.261.058.812)	(7.178.491.128)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	9.274.975.316	7.661.685.767
EKUITAS AKHIR	E.5	134.244.907.895	131.689.202.936

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dibentuk tahun 1982, keberadaannya diatur berdasarkan SK Menteri kehakiman No. M.01.03.TR.07.10 tahun 1982 yang diperbaharui dengan SK Menteri Kehakiman No. M.03.TR.07.10 tahun 1982. Saat itu Kantor Wilayah merupakan integrasi dari seluruh jajaran Pemasyarakatan, Keimigrasian, BHP dan Lembaga Peradilan Umum yang berada pada Propinsi Jawa Timur.

Pengembangan organisasi dan kelembagaan terus dilakukan hingga pada tahun 2005 Menteri Hukum dan HAM RI mengeluarkan Peraturan Menteri No.M.01.PR.07.10 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI, yang mana salah satu perubahannya adalah bertambahnya satu Divisi yaitu Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam rangka melaksanakan sebagian tugas kantor wilayah dibidang pelayanan hukum dan HAM berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan terkait.

Perubahan nomenklatur/tata nama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa timur dari masa ke masa :

1. Tahun 1982-2000 bernama Kanwil Departemen Kehakiman Jawa Timur,
2. Tahun 2000 bernama Kanwil Departemen Hukum dan Perundang-undangan Jawa Timur,
3. Tahun 2000-2004 bernama Kanwil Departemen

Kehakiman dan HAM Jawa Timur,

4. Tahun 2004-2009 bernama Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur,
5. Tahun 2009 bernama Kanwil Kementerian hukum dan HAM Jawa Timur,

Entitas berkedudukan di Jalan Kayon No.50-52 Surabaya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Fungsi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur adalah :

- Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan;
- Pembinaan di bidang Hukum dan HAM;
- Penegakan hukum dibidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual;
- Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan HAM;
- Pelayanan Hukum;
- Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi HAM;
- Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur berkomitmen dengan visi ***“masyarakat memperoleh kepastian hukum”***.

*Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Triwulan III Tahun 2022 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

A.3. Basis Akuntansi

*Basis
Akuntansi*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang

digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan

aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja

pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa		
pendapatan administrasi & penegakan hukum		
pendapatan lain lain		
Pendapatan dari BMN	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2.296.384.000	2.296.384.000
Belanja Barang	11.594.765.000	11.594.765.000
Belanja Modal	1.766.000.000	1.766.000.000
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	15.657.149.000	15.657.149.000

Realisasi

Pendapatan

Rp.16.617.798,-

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 adalah sebesar Rp.16.617.798,- atau mencapai 000 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.000,-. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur berasal dari Pendapatan dari pengelolaan BMN dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagaiberikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022

Uraian	Triwulan III TA 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	16.617.798	
Pendapatan Jasa lainnya			
Pendapatan bunga		-	
Pendapatan admin dan penegakan hukum			
Pendapatan Lain-lain			
Jumlah	-	16.617.798	

Realisasi Pendapatan Triwulan III TA 2022 dijelaskan pada tabel berikut ini :

Perbandingan Realisasi Pendapatan

Triwulan III TA 2022 dan Triwulan III TA 2021

URAIAN	30-Sep-22	30-Sep-21	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	16.617.798	19.972.467	
Pendapatan Jasa lainnya	-	-	
Pendapatan bunga	-	-	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	3.750.000	
Pendapatan penyelesaian TGR	-	-	
Pendapatan Lain-lain	-	-	
Jumlah	16.617.798	23.722.467	-29,95

B.2. BELANJA

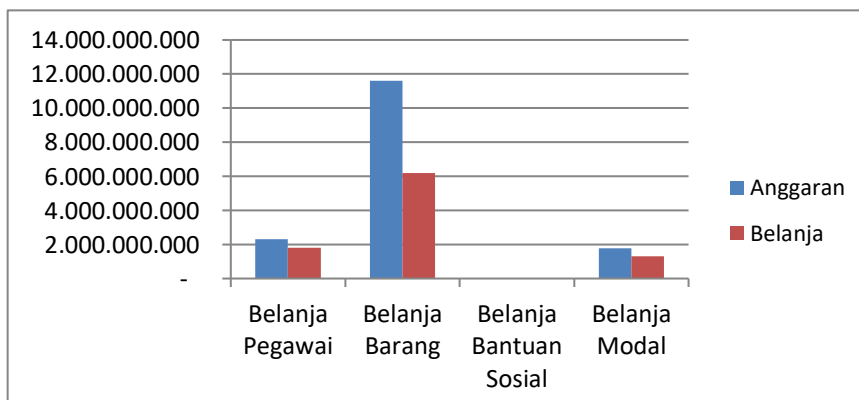
*Realisasi
Belanja Negara
Rp9.296.831.864,-*

Realisasi Belanja Triwulan III tahun 2022 adalah sebesar Rp.9.296.831.864,- atau 59,38% dari anggaran belanja sebesar Rp.15.657.149.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja triwulan III tahun 2022 tersaji sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja
Triwulan III Tahun 2022*

Uraian	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2.296.384.000	1.799.226.921	78,35
Belanja Barang	11.594.765.000	6.192.306.143	53,41
Belanja Modal	1.766.000.000	1.305.298.800	73,91
Belanja Bantuan Sosial			
Total Belanja Kotor	15.657.149.000	9.296.831.864	59,38
Pengembalian Belanja	-		
Total Belanja	15.657.149.000	9.296.831.864	59,38

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Tahun 2022 dijelaskan ditabel sebagai

berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2021

URAIAN	30-Sep-22	30-Sep-21	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.799.226.921	2.008.265.527	(10,41)
Belanja Barang	6.192.306.143	4.454.316.157	39,02
Belanja Modal	1.305.298.800	1.231.557.800	5,99
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
Jumlah	9.296.831.864	7.694.139.484	20,83

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp.1.799.226.921,-

Realisasi Belanja Pegawai Triwulan III tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.799.226.921 dan Rp2.008.265.527. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Realisasi belanja Triwulan III TA 2022 mengalami penurunan sebesar 10,41% dari Triwulan III TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena adanya 1 orang pegawai mutasi dan 3 orang pegawai pensiun.

Perbandingan Belanja Pegawai Triwulan III TA 2022 dan 2021

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.792.935.327	2.000.220.588	(10,36)
Belanja Lembur	6.292.000	8.415.000	(25,23)
Jumlah Belanja Kotor	1.799.227.327	2.008.635.588	(10,43)
Pegawai	(406)	(370.061)	(99,89)
Jumlah Belanja	1.799.226.921	2.008.265.527	(10,41)

Belanja Barang
Rp6.192.306.143

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang triwulan III tahun 2022 dan tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.6.192.306.143,- dan Rp.4.454.316.157,-. Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar % dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2021.

Perbandingan Belanja Barang Tahun 2022 dan Tahun 2021

URAIAN	REALISASI 30 September 2022	REALISASI 30 September 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.067.891.397	898.156.843	18,90
Belanja Barang Non Operasional	1.299.840.834	1.064.081.092	22,16
Belanja Jasa	1.093.240.192	878.999.266	24,37
Belanja Pemeliharaan	421.372.526	553.479.208	(23,87)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.255.512.128	942.407.854	139,34
Belanja Barang persediaan	73.828.446	119.202.094	(38,06)
Jumlah Belanja Kotor	6.211.685.523	4.456.326.357	39,39
Pengembalian Belanja	(19.379.380)	(2.010.200)	
Jumlah Belanja	6.192.306.143	4.454.316.157	39,02

Belanja Modal
Rp1.305.298.800

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal triwulan III tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1.305.298.800,- dan Rp.1.231.557.800,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2022 dan Tahun 2021*

URAIAN	REALISASI 30 SEPTEMBER 2022	REALISASI 30 SEPTEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.306.298.800	1.231.557.800	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	
Belanja Modal Lainnya	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	1.306.298.800	1.231.557.800	
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.306.298.800	1.231.557.800	

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.000,- dan Rp.000,-.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 SEPTEMBER 2022	REALISASI 30 SEPTEMBER 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Triwulan III 2022 adalah sebesar Rp.1.305.298.800,-.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021*

URAIAN	REALISASI 30 SEPTEMBER 2022	REALISASI 30 SEPTEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.305.298.800	1.231.557.800	
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	1.305.298.800	1.231.557.800	
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	1.305.298.800	1.231.557.800	

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal triwulan III 2022 dan triwulan III 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.000,- dan Rp.000,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 SEPTEMBER 2021	REALISASI 30 SEPTEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
Jumlah Belanja	0	0	

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.000,- dan Rp.000,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 SEPTEMBER 2022	REALISASI 30 SEPTEMBER 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	

*Belanja Modal
Lainnya
Rp.000.-*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.000,- dan Rp.000,- karena tidak tersedianya pagu untuk belanja modal lainnya.

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp.000,-*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.000,- dan Rp.000,- karena tidak tersedianya pagu untuk belanja modal lainnya.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.362.112.000,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.362.112.000,- dan Rp.000,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP

yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30-Sep-22	31-Des-21
Uang tunai	362.112.000	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	362.112.000	-

Kas di Bendahara Penerimaan Rp.000,-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 September 2022 dan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar masing-masing Rp.000,- dan Rp.000,- Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	30-Sep-22	31-Des-21
Uang Tunai		
Rekening Bank		
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.240.365.000,-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 September 2022 dan per tanggal 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.240.365.000,- dan Rp.000,- Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Yang merupakan kas atas Honor MPD (Majelis Pengawas Daerah) bulan Juli-Agustus 2022 yang belum diambil di rekening bendahara. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	30-Sep-22	31-Des-21
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	240.365.000	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Bendahara Boedel Pailit	-	-
Jumlah	240.365.000	-

*Piutang Bukan Pajak
Rp.1.436.234,-*

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 1.436.234 dan Rp 0. Piutang Bukan Pajak tersebut merupakan pendapatan sewa 9 unit rumah dinas bulan Juli yang dipotong dari gaji bulan Oktober, sesuai SPM Nomor 139 tanggal 14 September 2022 dan SP2D Nomor 221351503000232 tanggal 1 Oktober 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tipe Rumah	Unsur Perhitungan						Sewa/bulan	
		Prosentase	Lb	Hs	Ns	Fkb	Fk	Sb (Prosentase x Lb x Hs x Ns x Fkb x Fk)	
1	Golongan I Tipe C	2.75%	112	Rp 4,910,000	60%	80%	5%	Rp 362,947	
2	Golongan I Tipe C*	2.75%	112	Rp 4,910,000	60%	80%	5%	Rp -	
3	Golongan I Tipe D*	2.75%	54	Rp 4,910,000	60%	64%	5%	Rp -	
4	Golongan I Tipe D*	2.75%	54	Rp 4,910,000	60%	64%	5%	Rp -	
5	Golongan I Tipe D**	2.75%	54	Rp 4,910,000	60%	64%	5%	Rp -	
6	Golongan I Tipe D	2.75%	54	Rp 4,910,000	60%	64%	5%	Rp 139,994	
7	Golongan I Tipe D	2.75%	54	Rp 4,910,000	60%	64%	5%	Rp 139,994	
8	Golongan I Tipe D	2.75%	54	Rp 4,910,000	60%	64%	5%	Rp 139,994	
9	Golongan I Tipe D	2.75%	54	Rp 4,910,000	60%	64%	5%	Rp 139,994	
10	Golongan I Tipe D	2.75%	54	Rp 4,910,000	60%	64%	5%	Rp 139,994	
11	Golongan I Tipe D	2.75%	54	Rp 4,910,000	60%	64%	5%	Rp 139,994	
12	Golongan I Tipe D	2.75%	54	Rp 4,910,000	60%	64%	5%	Rp 139,994	
13	Golongan I Tipe E	2.75%	36	Rp 4,910,000	60%	64%	5%	Rp 93,329	
TOTAL								Rp 1,436,234	

* = kondisi sedang tidak ditempati

** = penarikan PNBP melalui aplikasi simponi

*Bagian Lancar
TP/TGR
Rp.000,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.000,- dan Rp.000,-. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Debitur per Satker	30-Sep-22	31-Des-21
1		-	-
2			
3			
4			
5			
6			
Jumlah		-	-

*Bagian Lancar
TPA Rp.000,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.000,- dan Rp.000,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Debitur per Satker	30-Sep-22	31-Des-21
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp.000,-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.000,- dan Rp.000,-. Penyisihan piutang takterttagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar Triwulan III 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar		0.50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar		0.50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Belanja Dibayar
di Muka
Rp.000,-*

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.000,- dan Rp.36.927.123,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun

barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka

Jenis	30-Sep-22	31-Des-21
Belanja Barang Dibayar Dimuka	-	36.927.123
Jumlah	-	36.927.123

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp.000,-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.000,- dan Rp.000,- merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Jenis	30-Sep-22	31-Des-21
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp.46.336.088,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.46.336.088,- dan Rp.11.324.185,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan
per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021*

Persediaan	30-Sep-22	31-Des-21
Barang Konsumsi	41.892.830	10.427.310
Amunisi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	4.443.258	896.875
Suku Cadang		
Pita cukai, materai dan leges		
Hewan dan Tanaman untuk diserahkan kepada masyarakat		
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		
Bahan Baku		
Persediaan untuk tujuan berjaga - jaga		
Persediaan Lainnya		
Jumlah	46.336.088	11.324.185

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan TP/TGR
Rp.000,-*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.000,-. dan Rp.000,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian TagihanTuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti
Rugi(TP/ TGR)
Per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021*

No	Debitur per Satker	30-Sep-22	31-Des-21
1		-	-
2			
3			
4			
5			
6			
Jumlah		-	-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp.000,-*

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.000,- dan Rp.000,-. Rincian TPA untuk tahun per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran
per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021*

No	Debitur	30-Sep-22	31-Des-21
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp.000,-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.000,- dan Rp.000,-. Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Triwulan III 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar		0.50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-	-	-
Tagihan PA			
Lancar		0.50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Tanah
Rp.114.941.838.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Harta Peninggalan Surabaya per 30 September 2022 adalah sebesar Rp114.941.838.000, tidak terdapat kenaikan atau penurunan dari Tahun 2021.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	114.941.838.000
Mutasi tambah:	-
Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	-
Mutasi kurang:	
Penghapusan Semu karena Reklasifikasi dari Intra ke Ekstr	-
Saldo per 30 September 2022	114.941.838.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Sept 2022	-
Nilai Buku per 30 Sept 2022	114.941.838.000

Sedangkan Rincian saldo Tanah per 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	KIB	Kode Barang	Luas	Nilai
1	1	2.01.01.01.001.1	551 m2	4,610,812,000
2	2	2.01.01.04.001.2	3600 m2	68,601,026,000
3	2	2.01.01.01.001.2	3210 m2	41,730,000,000
Jumlah				114,941,838,000

Tanah KIB 1 berada di Jalan Tenggilis Tengah V Blok P No. 4 dan 4A, RT 001 RW 002, Kendangsari, Rungkut, Surabaya yang digunakan untuk rumah dinas jabatan. Kemudian Tanah KIB 2 ukuran 3600 m² berada di Jalan Jenderal S. Parman No. 58, Waru, Sidoarjo yang digunakan untuk kantor operasional. Sedangkan Tanah KIB 2 ukuran 3210 m² terletak di Jalan Raya Juanda km 3-4, Sedati Agung, Sedati, Sidoarjo yang diperuntukkan rumah dinas jabatan.

*Peralatan dan
Mesin*

Rp.9.000.832.428

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp 9.000.832.428 dan Rp 7.771.201.345. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	7.771.201.345
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.360.298.800
Batal transfer keluar	10.491.994
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	8.000.000
Hibah Barang	0
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar	149.159.711
Penghentian dari penggunaan	-
Koreksi Pencatatan	-
Transaksi Normalisasi BMN	0
Saldo per 30 September 2022	9.000.832.428
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2022	5.575.375.068
Nilai Buku per 30 September 2022	3.425.457.360

*Gedung dan
Bangunan
Rp.19.191.884.964*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 19.191.884.964 dan Rp19.191.884.964. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	19.191.884.964
Mutasi tambah:	-
Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	-
Mutasi kurang:	
Penghapusan Semu karena Reklasifikasi dari Intra ke Ekstr	-
Saldo per 30 September 2022	19.191.884.964
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2022	3.010.011.126
Nilai Buku per 30 September 2022	16.181.873.838

Sedangkan rincian Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Harta Peninggalan Surabaya per 30 September 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Gedung dan Bangunan

No	KIB	Kode Barang	Luas	Nilai	Alamat	Status Penggunaan
1	1	4.01.01.08.001.1	269 m2	953,635,468	Jl. Jenderal S, Parman 58 Waru, Sidoarjo	Masjid Kantor
2	1	4.01.02.01.007.1	112 m2	458,395,613	Jl. Raya tenggilis tengah V Blok P No.4A	Rumah Dinas
3	1	4.01.02.01.010.1	54 m2	446,764,280	Jl. Raya Juanda Sedati Sidoarjo	Rumah Dinas

4	1	4.01.02.01.013. 1	36 m2	289,220,102	Jl. Raya Juanda Sedati Sidoarjo	Rumah Dinas
5	2	4.01.01.01.001. 2	860 m2	2,269,936,078	Jl. Jenderal S, Parman 58 Waru, Sidoarjo	Kantor
6	2	4.01.01.02.004. 2	408 m2	2,343,350,404	Jl. Jenderal S, Parman 58 Waru, Sidoarjo	Gudang
7	2	4.01.02.01.007. 2	112 m2	431,045,613	Jl. Raya tenggilis tengah V Blok P No.4	Rumah Dinas
8	2	4.01.02.01.010. 2	54 m2	318,680,023	Jl. Raya Juanda Sedati Sidoarjo	Rumah Dinas
9	3	4.01.02.01.010. 3	54m2	318,680,023	Jl. Raya Juanda Sedati Sidoarjo	Rumah Dinas
10	4	4.01.01.01.001. 4	770 m2	6,521,118,121	Jl. Jenderal S, Parman 58 Waru, Sidoarjo	Kantor
11	4	4.01.02.01.010. 4	54 m2	318,680,023	Jl. Raya Juanda Sedati Sidoarjo	Rumah Dinas
12	5	4.01.02.01.010. 5	54 m2	318,680,023	Jl. Raya Juanda Sedati Sidoarjo	Rumah Dinas
13	6	4.01.02.01.010. 6	54 m2	318,680,023	Jl. Raya Juanda Sedati Sidoarjo	Rumah Dinas
14	7	4.01.02.01.010. 7	54 m2	318,680,023	Jl. Raya Juanda Sedati Sidoarjo	Rumah Dinas
15	8	4.01.02.01.010. 8	54 m2	318,680,023	Jl. Raya Juanda Sedati Sidoarjo	Rumah Dinas
16	9	4.01.02.01.010. 9	54 m2	318,680,023	Jl. Raya Juanda Sedati Sidoarjo	Rumah Dinas
17	10	4.01.02.01.010. 10	54 m2	318,680,023	Jl. Raya Juanda Sedati Sidoarjo	Rumah Dinas
Jumlah				16,581,585,886		

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp.000,-*

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.000,- dan Rp.000,-.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi masuk	-
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 30 Sept 2022	-
Akumulasi Penyusutan 30 Sept 2022	-
Nilai Buku per 30 Sept 2022	-

*Aset Tetap
Lainnya
Rp.000,-*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.000,- dan Rp.000,- Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal

pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 30 Sept 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Sept 2022	-
Nilai Buku per 30 Sept 2022	-

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp.000,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.000,- dan Rp.000,- yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan pada Lembaga Pemasarakatan malang yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1					
2					
	Jumlah	-		-	

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp.(8.585.386.194)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp(8.585.396.194) dan Rp(7.721.813.026). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	8,945,832,428	5,575,375,068	3,370,457,360
2	Gedung dan Bangunan	19,191,884,964	3,010,011,126	16,181,873,838
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0

Akumulasi Penyusutan	28,137,717,392	8,585,386,194	19,552,331,198
----------------------	----------------	---------------	----------------

Aset Tak

Berwujud Rp.000,-

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.000,- dan Rp.000,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 30 September 2022 adalah sebagai berikut

Rincian Aset Tak berwujud

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
transfer masuk	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 September 2022	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 30 September 2022	-

Aset Lain-Lain

Rp940.711.598,-

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 940.711.598 dan Rp 948.711.598. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	948.711.598
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap	8.000.000
Saldo per 30 September 2022	940.711.598
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2022	948.711.598
Nilai Buku per 30 September 2022	(8.000.000)

Akumulasi

Penyusutan dan

Amortisasi Aset

Lainnya

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing

Rp.(940.711.598),-

sebesar Rp (940.711.598) dan Rp (948.711.598). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Uang Muka dari
KPPN

Rp362.112.000,-

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.362.112.000,- dan Rp.000,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN

No	Uraian	30-Sep-22
	Kas Bendahara	362.112.000
Jumlah		362.112.000

Utang kepada
Pihak Ketiga

Rp452.398.141,-

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp452.398.141 dan Rp 371.200,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jenis Utang kepada Pihak Ketiga	Nilai	Keterangan
Belanja	Rp136.853.141	Gaji PNS bulan Oktober

Pegawai yang masih harus dibayar		2022 sesuai SPM Nomor 139 tanggal 14 September 2022 dan SP2D Nomor 221351503000232 tanggal 1 Oktober 2022
Belanja Barang yang masih harus dibayar	Rp 75.180.000	Honor PPNPN Susulan Bulan September 2022 sesuai SPM Nomor 149 tanggal 3 Oktober dan SP2D Nomor 221351303003483 tanggal 4 Oktober 2022
Belanja Barang yang masih harus dibayar	Rp 240.365.000	Honor MPD Juli-Agustus 2022 yang belum diambil di Rekening bendahara
Total	Rp452.398.141	

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp. 140.000.484,-

C.26 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.140.000.484,- dan Rp.000,- Utang yang belum ditagihkan merupakan kuitansi yang belum SPJ-kan.

Pendapatan Diterima di Muka Rp.000,-

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp.000,- dan Rp.000,- Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Total	-	

Beban yang Masih harus Dibayar Rp.000,-

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp.000,- dan Rp.000,-

merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
30 September 2022 dan 31 Desember 2021*

Keterangan	30-Sep-22	31-Des-21
	-	
		-
Jumlah	-	-

Ekuitas

Rp.134.244.907.895,- **C.29 Ekuitas**

Ekuitas per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.134.244.907.895,- dan Rp.134.230.991.391,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp.18.054.032,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 30 September 2021 adalah sebesar Rp. 18.054.032 dan Rp 19.972.467,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	18.054.032	19.972.467	(9,61)
Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	-	-	0,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	0,00
Jumlah	18.054.032	19.972.467	(9,61)

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari sewa rumah dinas sebanyak 10 unit.

Beban Pegawai
Rp1.936.080.062,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.936.080.062,- dan Rp 2.008.265.527,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.424.534.800	1.441.217.060	(1,16)
Beban Pembulatan Gaji PNS	22.963	24.915	(7,83)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	87.521.160	89.488.620	(2,20)
Beban Tunj. Anak PNS	21.137.434	18.235.412	15,91
Beban Tunj. Struktural PNS	75.300.000	105.760.000	(28,80)
Beban Tunj. Fungsional PNS	24.960.000	4.160.000	100,00
Beban Tunj. PPh. PNS	5.107.091	6.998.820	(27,03)
Beban Tunj. Beras PNS	67.423.020	64.091.700	5,20
Beban Uang Makan PNS	173.307.000	210.904.000	(17,83)
PNS	50.475.000	58.970.000	(14,41)
Beban Uang Lembur	6.292.000	8.415.000	0,00
Jumlah	1.936.080.468	2.008.265.527	(3,59)

Beban

D.3 Beban Persediaan

Persediaan
Rp.72.760.961,-

Jumlah Beban Persediaan pada Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.72.760.961,- dan Rp.117.151.610,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-

barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan
Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Sep-22	30-Sep-21	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	72.760.961	117.151.610	(37,89)
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges			
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan Baku		-	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya			
Jumlah Beban Persediaan	72.760.961	117.151.610	(37,89)

*Beban Barang
dan Jasa
Rp.3.653.747.259*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.3.653.747.259,- dan Rp. 2.927.200.286,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Sep-22	30-Sep-21	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	1.143.474.297	898.156.843	27,31
Beban Barang Non Operasional	1.377.447.684	1.064.081.092	29,45
Beban Langganan Daya dan Jasa	150.054.066	121.555.014	23,45
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	#DIV/0!
Beban sewa	147.862.657	368.885.685	-59,92
Beban Jasa Profesi	59.600.000	27.600.000	115,94
Beban Jasa Lainnya	775.308.555	446.921.652	73,48
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	
Jumlah	3.653.747.259	2.927.200.286	24,82

Beban

Pemeliharaan

Rp386.683.081,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 386.683.081,- dan Rp 516.316.606,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	293.495.339	337.945.297	(13,15)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - penanganan pandemi covid19	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	83.666.097	176.462.409	(52,59)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	9.521.645	1.908.900	0,00
Jumlah	386.683.081	516.316.606	(25,11)

Beban

Perjalanan

Dinas

Rp.2.240.839.346

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.2.240.839.346,- dan Rp.940.397.654,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021 adalah sebagai berikut:

Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021

URAIAN JENIS BEBAN	30-Sep-22	30-Sep-21	NAIK (TURUN)
Beban Perjalanan Biasa	1.452.059.749	626.357.654	131,83
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	81.950.000	44.200.000	85,41
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	90.950.000	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	706.829.597	178.890.000	295,12
Jumlah	2.240.839.346	940.397.654	138,29

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp.000,-

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.000,- dan Rp.000,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

Beban Bantuan Sosial Rp.000,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.000,- dan Rp.000,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.989.002.135,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 989.002.135,- dan Rp 692.881.912,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan

untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	589.290.087	332.143.601	77,42
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	399.712.048	360.738.311	10,80
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	0,00
Jumlah Penyusutan	989.002.135	692.881.912	42,74
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	989.002.135	692.881.912	42,74

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp.000,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.000,- dan Rp.000,-

D.11 Kegiatan Non Operasional

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.000,-*

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
Triwulan III 2021 dan Triwulan III 2020

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	3.750.000	100,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	#DIV/0!
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	#DIV/0!
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Defisit Selisih Kurs	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	3.750.000	(100,00)

Defisit Pos Luar Biasa Rp.000,-

D.12 Defisit Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa
Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2021*

URAIAN	30-Sep-22	30-Sep-21	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	0	0	
Beban Persediaan	0	0	
Jumlah	0	0	

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp
134.230.991.391*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.134.230.991.391,- dan Rp. 131.206.008.297,-

*Defisit LO
Rp
(9.261.058.812)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar Rp. (9.261.058.812) dan Rp. (7.178.491.128),-. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp.000,-

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021.

Penyesuaian Nilai Aset

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Rp.000,-

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.000,- dan Rp.000,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp.000,-

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.000,- dan Rp.000,- Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Koreksi Persediaan	-
Jumlah	-

Selisih
Revaluasi Aset
Tetap
Rp.000,-

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.000,- dan Rp.000,-

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi
Rp.000,-*

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.000,- dan Rp.000,- Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
30 September 2022*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Jumlah	-

*Koreksi Lain-
Lain Rp.000,-*

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.000,- dan Rp.000,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Lain - lain	-
Jumlah	-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 September 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.9.274.975.316,- dan Rp. 7.661.685.767,- Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari :

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	16.617.798
Ditagihkan ke Entitas Lain	(9.296.831.864)
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	5.238.750
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(9.274.975.316)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2022, DDEL sebesar Rp.16.617.798,- sedangkan DKEL sebesar Rp.9.296.831.864,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 September 2021 sebesar Rp.000,-. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 September 2022 sebesar Rp.5.238.750,-.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2022 sebesar Rp.000,- dari total Rp.000,- yang diterima sepanjang tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2022 adalah Rp.000,-.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1		Uang	Rp -
2		Barang	Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.134.244.907.895,- dan Rp. 131.689.202.936,-.

F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Belanja penanganan COVID-19 Triwulan III TA 2022 pada DIPA AHU Kanwil jatim :

No	Akun	Keterangan	Nilai Realisasi
1	521214	Pembelian Masker	Rp. 14.967.101

2. Informasi Rekening Lainnya pada BHP Surabaya

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Jenis Rekening	Keterangan
1	140-00-07255434 (Mandiri)	RPL 135 Balai Harta Peninggalan utk PDT	Giro (30)	Surat Ijin Pembukaan No. S-5487/MK.5/2016 tanggal 12 Juli 2016 Aktif. *Rekening Bendahara Penerimaan Uang Pihak Ketiga
2	141-00-1600255-2 (Mandiri)	RPL 135 Balai Harta Peninggalan Surabaya utk PDT Kepailitan	Giro (30)	Surat Ijin Pembukaan No. S-4909/MK.5/2017 tanggal 31 Mei 2017 Aktif. *Rekening Bendahara Penerimaan Kepailitan

4. Laporan Realisasi Anggaran Pailit Triwulan III Tahun 2022 (terlampir)

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTAS		SALDO AKHIR
			DEBET	KREDIT	

1	Tangkar	3,330,739.75			3,330,739.75
2	Nyoo Hie Kee dan Hie Hong	243,061.03			243,061.03
3	Tjoa Tjoen Moi	195,927.62			195,927.62
4	Liong Rie En	1,967,383.11			1,967,383.11
5	Kurdi Suroso Purnomo & Puspita Swandayani Jl. Kalianyar Kulon IV/65 Surabaya	3,949,812.98			3,949,812.98
6	Hariadi Tjandra Jl. Patemon IV/203 Surabaya	2,287,428.21			2,287,428.21
7	Nyoto Tombeng Jl. Taman Kusuma Bangsa No.5 Surabaya	16,703,133.67			16,703,133.67
8	Irwan Saputro Eko Susilo	9,163,046.10			9,163,046.10
9	PT. Widjajadi Setiono & Widjajadi Setiono Jl. Bongkaran 15 Surabaya, Jl. Kusuma Bangsa 122 Surabaya	80,034,319.01			80,034,319.01
10	Peter Gusnarso	952,544.31			952,544.31
11	Taufiq Wirahadi Surya, Cs Jl. Ketapang III/3 Surabaya	3,695.74			3,695.74
12	Budi Indarto	1,369,868.64			1,369,868.64
13	Muljo Tedjo dan Ny. Mulyo Tedjo	5,781,295.38			5,781,295.38
14	Wibowo Tjondro	5,917,085.14			5,917,085.14
15	Suwito Susilo (Lauw Thin Swie) Jl. Kalianyar No.4 Surabaya	5,567,050.57			5,567,050.57
16	Liem Kok Mei	6,714,904.36			6,714,904.36
17	Yahya Sugiarto Hadiwidjaja Jl. Wuni No.2 Surabaya	8,527,566.62			8,527,566.62
18	Yau Tau Pin	39,750,771.20			39,750,771.20
19	Ny. Nani Gondokusumo	3,140,420.33			3,140,420.33
20	Iwan Santoso	146,524.38			146,524.38
21	J.B.T handoko Sugipranoto	2,963,311.57			2,963,311.57
22	Ir. Yuwono Thamrin Jl. Manyar Kertoajo V/24 Surabaya	74,173.32			74,173.32
23	Nyoo Tjoen Lay (Nyoman Sulaiman)	2,281,805.50			2,281,805.50
24	Yuliatin	3,542,075.72			3,542,075.72
25	PT. Pelayaran Taat Suradi Raya Jl. Sarwajala No. 10-12 Surabaya	6,370,393.59			6,370,393.59

26	PT. OX. Komunikasi Wisata Jl. By Pass Ngurah Rai 189 Sanur Bali	53,095,087.48			53,095,087.48
27	PT. Pohon Mas Mapan Santosa Komplek RMI Blok 11 No 34-35, Jalan Ngangel Jaya Selatan Surabaya	25,824,439.60			25,824,439.60
28	Pal. PT. Vistora Medika Jl. Kupang Indah VI/14 Surabaya	159,036,965.55			159,036,965.55
29	Krisna Pudja Herlambang Jl. Tenggilis Timur II/43 Surabaya	3,314,144.90			3,314,144.90
30	Candra Hasan	5,994,612.61			5,994,612.61
31	PT. Calio Management Jalan Jaksa Agung Suprpto 391 Sby	2,011,437,262.21			2,011,437,262.21
32	Pal. PT. Remaja Pratama Engineering Jl. Tanjungsari No.17 Surabaya	7,068,605.64			7,068,605.64
33	Pal. CV. Mitra Cipta Raya	825,438.32			825,438.32
34	Pal. Tjeng Ling Bauw/ UD Surya Naga Jl. Kapasan Dalam I/27 Surabaya	19,552,666.34			19,552,666.34
35	Pal. PT. Rizki Robbi Izzati Jalan Kartini No. 61 Ds. Talang Kec. Rejosoro, Nganjuk	357,465,901.45			357,465,901.45
	Biaya jasa appraisal	357,465,901.45		(57,750,000.00)	415,215,901.45
36	Pal. Hj. Gito Rahardjo dan Melani Melania Ongkowibowo Jl. Panderman No. 18 Malang	204,187,861.89			204,187,861.89
37	Pal. Ko Eng Ming dan Henny Yohana Jl. Sekawan Anggun A-21 Sidoarjo	398,788.99			398,788.99
38	Pal. PT. Satria Manunggal Prima Jaya Jl. Ngagel Jaya Indah No.11 Lt. III Surabaya	3,339,868.74			3,339,868.74
39	Pal. Lanny Limantoro	0.00			0.00
40	UD Harapan Kita Dahulu di Jalan Griyo Mapan Sentosa AL-1 Tropodo Sidoarjo, sekarang di Jalan Camelia Gang I No. 14 Perumahan Garden Dian Regency Sidoarjo	254,472.65			254,472.65
41	CV Anugerah Dwi Sakti Jalan Indragiri No. 5 Surabaya	2,145,666.84			2,145,666.84
42	Pal. PT Tribuana Husada Lestari Jl. Kalianget No. 126 Surabaya	1,827,386.75			1,827,386.75
43	Pal. Putra Mapan Sentosa Jl. Klampis Anom IV/23 Blok F.36 Surabaya	(0.00)			(0.00)

44	Pal. Gidion Likhi Suwanto Jalan Tambakboyo Nomor 174-1 RT. 005 RW.007 Kelurahan Pacarkembang, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya	572,116.69			572,116.69
45	Pal. PT. Kharisma Jaya Perkasa Jalan Sentra Eropa Blok AB-10 No.11, Balikpapan Baru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	3,572,126.91			3,572,126.91
46	Pal. PT. Hasil Karya Mitra Utama Ruko Klampis Megah Blok H/19-20 Surabaya	1,767,127.14			1,767,127.14
47	PT. Trimanunggal Nusa Perkasa Dahulu di Jalan Raya Narogong KM 5,5 Bojong, Rawa Lumbu Bekasi 17116 sekarang di Jalan Sutorejo Tengah VIII/34, Surabaya	131,363,820.10			131,363,820.10
48	PT. Tigaco Sakti Jl. Mulyosari I No. 62 Surabaya	442,043.27			442,043.27
49	Pemohon PKPU/RUDYANTO Jl. Wonorejo IV/88, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya.	(0.00)			(0.00)
50	Pal. JAMES LIM Jl. Taman Mutiara C3/539 RT 001 RW 005, Kejawen Putih Tambak, Mulyorejo	-			-
51	Pal. PRAYITNO Jalan Karimata No. 26 RT. 001, RW. 001 Sumbersari Jember	9,716,006.00			9,716,006.00
52	Pal. PT Samudera Karya Energi Jl. Jendral Sudirman Komplek Ruko Bandar Blok G No.21 Kec. Balikpapan Selatan, Kotamadya Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur	-			-
53	Pal CV. TIMIKA SEJAHTERA Jalan Serayu Timur Ruko PGM Blok B No. 4 Kel. Pandean, Kec. Taman, Kab. Madiun	-			-
54	Pal. KOPERASI SERBA USAHA "MONTANA HOTEL" Jalan Kahuripan No. 9, Kec. Klojen, Malang	21,832,077.00	-		21,832,077.00

55	Pal. PT ALSINDO PLASTEC Surabaya Industrial Estate Rungkut Jalan Rungkut Industri VII/16 Surabaya	1,166,565.07			1,166,565.07
56	Pal. PT LINTANG ANDALAN MAKMUR Jalan Raya By Pas Km 32,2 Krian Sidoarjo	1,536,722.32			1,536,722.32
57	Pal. CV NEW INTERTEX Kantor di Ruko Jembatan Merah Plaza Blok A No. 10-11, Jalan Kasuari Surabaya	76,000,000.00	2,510,000,000.00		2,586,000,000.00
	Biaya penghapusan roya			(1,500,000.00)	2,586,000,000.00
	Biaya pemeliharaan			(6,046,670.00)	2,584,500,000.00
	Biaya iklan			(3,500,000.00)	2,578,453,330.00
	Setor Pajak dan PNPB			(313,750,000.00)	2,574,953,330.00
	Pembagian ke Kreditur			(2,096,657,157.12)	2,261,203,330.00
	Jumlah Pailit CV. New Intertex	76,000,000.00	2,510,000,000.00	(2,421,453,827.12)	164,546,172.88
58	Pal. PT SEAGATE MARITIME LINE Dahulu beralamat di Jalan Letjen Sutoyo No. 262 Sidoarjo, sekarang beralamat di Jalan Raya Manyar No. 61 A Surabaya	1,327,190.00			1,327,190.00
59	Pal. SOENARYO KURNIAWAN NYOTO Jalan Keputih Tegal Timur No. 66 Surabaya	150,000.00			150,000.00
60	Pal. CV INDAH BUMI GEMILANG Jalan Yosodipuro No. 3 RT.006/RW.010, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya	-			-
61	Pailit Andre Martinus Wistoraharjo	-			-
62	Pailit PT. SANDA PERMAI ABADI Jalan Raya Kletek Nomor 110 Sidoarjo	-			-
63	CV. Green Leaf Indonesia	2,340,406.62	13,300,000.00		15,640,406.62
64	Koperasi Mandiri Artha Makmur	765,419.32	51,090,765.00		51,856,185.32
65	PT. Tiara Persada	-	2,500,000.00		2,500,000.00
66	Pusat Susu Indonesia	8,512.82			8,512.82
67	PT. Siliwangi NV	23,069.17			23,069.17
68	Terry Wijaya Kusuma	14,597.88			14,597.88
69	PT. Bank Nusantara	16,402,561.81			16,402,561.81

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
WILAYAH/PROVINSI : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur 013030500KD

Waktu Olap: 2022-11-08 07:35:50.0 [B@59e7a3b5]

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 08/11/22 8:58 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_face_uappaw_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	15,657,149,000	9,296,831,864	(6,360,317,136)	59	12,323,134,000	7,694,139,484	(4,628,994,516)	62
C	PEMBIAYAAN				0				0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 03 **DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 013030500KD **Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/11/22 8:58 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,410,491,000	1,410,491,000	1,311,154,100	0	1,311,154,100	92.96	99,336,900
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25,000	25,000	21,326	406	20,920	83.68	4,080
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	141,050,000	141,050,000	80,322,090	0	80,322,090	56.95	60,727,910
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	22,005,000	22,005,000	19,407,688	0	19,407,688	88.2	2,597,312
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	78,960,000	78,960,000	73,500,000	0	73,500,000	93.09	5,460,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	261,344,000	261,344,000	22,880,000	0	22,880,000	8.75	238,464,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,796,000	1,796,000	5,031,443	0	5,031,443	280.15	(3,235,443)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	62,284,000	62,284,000	61,846,680	0	61,846,680	99.3	437,320
511129	Belanja Uang Makan PNS	237,600,000	237,600,000	173,307,000	0	173,307,000	72.94	64,293,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	54,250,000	54,250,000	45,465,000	0	45,465,000	83.81	8,785,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,269,805,000	2,269,805,000	1,792,935,327	406	1,792,934,921	78.99	476,870,079
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	26,579,000	26,579,000	6,292,000	0	6,292,000	23.67	20,287,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	26,579,000	26,579,000	6,292,000	0	6,292,000	23.67	20,287,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2,296,384,000	2,296,384,000	1,799,227,327	406	1,799,226,921	78.35	497157079
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,216,978,000	1,270,978,000	897,282,644	0	897,282,644	70.6	373,695,356
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	87,000,000	87,000,000	58,985,000	0	58,985,000	67.8	28,015,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,000,000	18,000,000	8,293,625	0	8,293,625	46.08	9,706,375
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	137,280,000	137,280,000	90,320,000	0	90,320,000	65.79	46,960,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	40,812,000	40,307,000	13,010,128	0	13,010,128	32.28	27,296,872
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,500,070,000	1,553,565,000	1,067,891,397	0	1,067,891,397	68.74	485,673,603
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	782,834,000	785,984,000	287,831,501	0	287,831,501	36.62	498,152,499
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,527,000,000	1,527,000,000	885,600,000	0	885,600,000	58	641,400,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	439,269,000	373,051,000	111,442,232	0	111,442,232	29.87	261,608,768
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	144,800,000	89,800,000	14,967,101	0	14,967,101	16.67	74,832,899

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 03 **DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 013030500KD **Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/11/22 8:58 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,893,903,000	2,775,835,000	1,299,840,834	0	1,299,840,834	46.83	1,475,994,166
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	65,498,000	65,498,000	29,095,046	0	29,095,046	44.42	36,402,954
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	55,000,000	44,733,400	0	44,733,400	81.33	10,266,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	65,498,000	120,498,000	73,828,446	0	73,828,446	61.27	46,669,554
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	192,000,000	180,000,000	138,362,071	0	138,362,071	76.87	41,637,929
522112	Belanja Langganan Telepon	12,000,000	12,000,000	2,112,712	0	2,112,712	17.61	9,887,288
522113	Belanja Langganan Air	18,000,000	12,000,000	4,121,320	0	4,121,320	34.34	7,878,680
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	16,800,000	16,800,000	2,800,000	0	2,800,000	16.67	14,000,000
522141	Belanja Sewa	230,388,000	230,388,000	110,935,534	0	110,935,534	48.15	119,452,466
522151	Belanja Jasa Profesi	176,500,000	171,100,000	59,600,000	0	59,600,000	34.83	111,500,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	824,840,000	904,840,000	754,310,555	0	754,310,555	83.36	150,529,445
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	102,366,000	108,713,000	20,998,000	0	20,998,000	19.32	87,715,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,572,894,000	1,635,841,000	1,093,240,192	0	1,093,240,192	66.83	542,600,808
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	451,260,000	439,725,000	292,881,339	0	292,881,339	66.61	146,843,661
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	50,000,000	35,000,000	26,504,350	0	26,504,350	75.73	8,495,650
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	181,640,000	172,680,000	81,666,097	0	81,666,097	47.29	91,013,903
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40,000,000	40,000,000	20,320,740	0	20,320,740	50.8	19,679,260
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	722,900,000	687,405,000	421,372,526	0	421,372,526	61.3	266,032,474
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	3,194,462,000	3,164,718,000	1,449,181,701	1,828,550	1,447,353,151	45.73	1,717,364,849
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	285,450,000	285,450,000	81,950,000	0	81,950,000	28.71	203,500,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	66,108,000	0	0	0	0	66,108,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,359,588,000	1,305,345,000	724,380,427	17,550,830	706,829,597	54.15	598,515,403
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	4,839,500,000	4,821,621,000	2,255,512,128	19,379,380	2,236,132,748	46.78	2,585,488,252
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	11,594,765,000	11,594,765,000	6,211,685,523	19,379,380	6,192,306,143	53.57	5402458857
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 03 **DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 013030500KD **Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur**

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 08/11/22 8:58 AM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,766,000,000	1,766,000,000	1,305,298,800	0	1,305,298,800	73.91	460,701,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	1,766,000,000	1,766,000,000	1,305,298,800	0	1,305,298,800	73.91	460,701,200
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,766,000,000	1,766,000,000	1,305,298,800	0	1,305,298,800	73.91	460701200
	JUMLAH BELANJA	15,657,149,000	15,657,149,000	9,316,211,650	19,379,786	9,296,831,864	59.5	6,360,317,136

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
WILAYAH/PROVINSI : 013030500KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Kode Lap : LRA.P.W.1
Tanggal : 08/11/22 8:58 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pond_akun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	16,617,798	0	16,617,798	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	16,617,798	0	16,617,798	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	16,617,798	0	16,617,798	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	16,617,798	0	16,617,798	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 03 **DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 013030500KD **Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur**

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 08/11/22 8:58 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_uappaw --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	144,800,000	89,800,000	14,967,101	0	14,967,101	16.67	74,832,899
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	144,800,000	89,800,000	14,967,101	0	14,967,101	16.67	74,832,899
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	55,000,000	44,733,400	0	44,733,400	81.33	10,266,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	0	55,000,000	44,733,400	0	44,733,400	81.33	10,266,600
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	102,366,000	108,713,000	20,998,000	0	20,998,000	19.32	87,715,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	102,366,000	108,713,000	20,998,000	0	20,998,000	19.32	87,715,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	247,166,000	253,513,000	80,698,501	0	80,698,501	31.83	172814499
	JUMLAH BELANJA	247,166,000	253,513,000	80,698,501	0	80,698,501	31.83	172,814,499

NERACA
TINGKAT WILAYAH
PER SEPTEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 03

DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

UAPPAW : 013030500KD

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Tgl Data 08/11/22 7:38 AM

Tgl. Cetak 08/11/2022 8:58 AM

lap_neraca_uappaw_komparatif --SAKTI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	362,112,000	0	362,112,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	240,365,000	0	240,365,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	36,927,123	(36,927,123)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	1,436,234	0	1,436,234	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	1,436,234	0	1,436,234	0.00
Persediaan	46,336,088	11,324,185	35,011,903	309.18
JUMLAH ASET LANCAR	650,249,322	48,251,308	601,998,014	1,247.63
ASET TETAP				
Tanah	114,941,838,000	114,941,838,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	9,000,832,428	7,771,201,345	1,229,631,083	15.82
Gedung dan Bangunan	19,191,884,964	19,191,884,964	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(8,585,386,194)	(7,721,813,026)	(863,573,168)	11.18
JUMLAH ASET TETAP	134,549,169,198	134,183,111,283	366,057,915	0.27
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	940,711,598	948,711,598	(8,000,000)	(0.84)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(940,711,598)	(948,711,598)	8,000,000	(0.84)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	135,199,418,520	134,231,362,591	968,055,929	0.72
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	452,398,141	371,200	452,026,941	121,774.50
Utang Yang Belum Ditagihkan	140,000,484	0	140,000,484	0.00
Uang Muka dari KPPN	362,112,000	0	362,112,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	954,510,625	371,200	954,139,425	257,041.87
JUMLAH KEWAJIBAN	954,510,625	371,200	954,139,425	257,041.87
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	134,244,907,895	134,230,991,391	13,916,504	0.01
JUMLAH EKUITAS	134,244,907,895	134,230,991,391	13,916,504	0.01
JUMLAH EKUITAS	134,244,907,895	134,230,991,391	13,916,504	0.01
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	135,199,418,520	134,231,362,591	968,055,929	0.72

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH
PER SEPTEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 03

DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

WILAYAH/PROVINSI : 013030500KD Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Tgl Data 08/11/22 7:28 AM

Tgl. Cetak 08/11/2022 8:58 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw --SAKTI

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	241,520,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	120,592,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	240,365,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	1,436,234	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	41,892,830	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	4,443,258	0
0.0	131111	Tanah	114,941,838,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	9,000,832,428	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	19,191,884,964	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,575,375,068
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,010,011,126
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	940,711,598	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	940,711,598
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	136,853,141
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	75,180,000
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	240,365,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	140,000,484
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	362,112,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	9,296,831,864
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	16,617,798	0
0.0	313211	Transfer Keluar	5,238,750	0
0.0	391111	Ekuitas	0	134,230,991,391
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	18,054,032
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,424,534,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	22,963	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	87,521,160	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	21,137,434	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	75,300,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	24,960,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	5,107,091	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	67,423,020	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	173,307,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	50,475,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	6,292,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	972,482,144	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	58,985,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,677,025	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	90,320,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	13,010,128	0
3.0	521211	Beban Bahan	303,372,501	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH
PER SEPTEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 03

DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

WILAYAH/PROVINSI : 013030500KD Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Tgl Data 08/11/22 7:28 AM

Tgl. Cetak 08/11/2022 8:58 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw --SAKTI

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	885,600,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	161,386,682	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	27,088,501	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	139,626,211	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,372,295	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	5,255,560	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2,800,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	147,862,657	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	59,600,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	754,310,555	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	20,998,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	293,495,339	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	83,666,097	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	1,453,888,299	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	81,950,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	724,380,427	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	589,290,087	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	399,712,048	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	72,760,961	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	9,521,645	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	406
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	1,828,550
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	17,550,830
JUMLAH			154,045,865,490	154,045,865,490

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
PER SEPTEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 03

DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

WILAYAH/PROVINSI : 013030500KD

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Tgl Data 08/11/22 7:36 AM

Tgl. Cetak 08/11/2022 8:58 AM

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	9,296,831,864
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	16,617,798	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	16,617,798
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,311,154,100	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21,326	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	80,322,090	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	19,407,688	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	73,500,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	22,880,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	5,031,443	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	61,846,680	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	173,307,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	45,465,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	6,292,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	897,282,644	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	58,985,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,293,625	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	90,320,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	13,010,128	0
3.0	521211	Belanja Bahan	287,831,501	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	885,600,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	111,442,232	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	14,967,101	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	29,095,046	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-	44,733,400	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	138,362,071	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,112,712	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	4,121,320	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2,800,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	110,935,534	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	59,600,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	754,310,555	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	20,998,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	292,881,339	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	26,504,350	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	81,666,097	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	20,320,740	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,449,181,701	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	81,950,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	724,380,427	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
PER SEPTEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 03

DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

WILAYAH/PROVINSI : 013030500KD

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Tgl Data 08/11/22 7:36 AM

Tgl. Cetak 08/11/2022 8:58 AM

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,305,298,800	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	406
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	1,828,550
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	17,550,830
JUMLAH			9,332,829,448	9,332,829,448

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 03 **DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 013030500KD **Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur**

Kode Lap : LO.WIL
 Tanggal : 08/11/22 8:57 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lo_wilayah --SAKTI
 Tgl Data : 8/11/22 7:39 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	18,054,032	19,972,467	(1,918,435)	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	18,054,032	19,972,467	(1,918,435)	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	18,054,032	19,972,467	(1,918,435)	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	1,936,080,062	2,008,265,527	(72,185,465)	-
Beban Persediaan	72,760,961	117,151,610	(44,390,649)	-
Beban Barang dan Jasa	3,653,747,259	2,927,200,286	726,546,973	-
Beban Pemeliharaan	386,683,081	516,316,606	(129,633,525)	-
Beban Perjalanan Dinas	2,240,839,346	940,397,654	1,300,441,692	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 013030500KD Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Kode Lap : LO.WIL
 Tanggal : 08/11/22 8:57 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lo_wilayah --SAKTI
 Tgl Data : 8/11/22 7:39 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	989,002,135	692,881,912	296,120,223	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	9,279,112,844	7,202,213,595	2,076,899,249	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(9,261,058,812)	(7,182,241,128)	(2,078,817,684)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	3,750,000	(3,750,000)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	3,750,000	(3,750,000)	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	3,750,000	(3,750,000)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(9,261,058,812)	(7,178,491,128)	(2,082,567,684)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(9,261,058,812)	(7,178,491,128)	(2,082,567,684)	-

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 013030500KD Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Tgl Data : 08/11/22 7:39 AM
 Kode Lap : LPE.WIL
 Tanggal : 08/11/22 8:57 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lpe_uappaw --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	134,230,991,391	131,206,008,297	3,024,983,094	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9,261,058,812)	(7,178,491,128)	(2,082,567,684)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	9,274,975,316	7,661,685,767	1,613,289,549	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	13,916,504	483,194,639	(469,278,135)	-
EKUITAS AKHIR	134,244,907,895	131,689,202,936	2,555,704,959	-